

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa cara media membungkai isu RUU TNI sangat memengaruhi bagaimana publik memahaminya, terutama dalam konteks politik yang kompleks dan penuh dinamika. *Framing* bukan sekadar teknik penyajian informasi melainkan alat yang membentuk cara berpikir masyarakat terhadap suatu peristiwa, aktor, atau kebijakan. Dalam kasus pemberitaan isu dwifungsi militer dalam RUU TNI, perbedaan pendekatan antara Kompas.com dan Tempo.co menjadi cerminan dari bagaimana media bisa mengarahkan opini publik ke arah yang berbeda.

Melalui analisis *framing* Robert N. Entman, pemberitaan tentang RUU TNI periode 14 Maret 2025 hingga 21 Maret 2025 dan menunjukkan bahwa terlihat Kompas.com dan Tempo.co membentuk gambaran realitas yang berbeda dalam menyajikan isu ini. Peneliti dapat menyimpulkan dari hasil analisis penelitian sebagai berikut, bahwa Kompas.com menunjukkan kecenderungan *framing* yang lebih berhati-hati dan menjaga stabilitas wacana agar tidak terjadi keresahan publik dan ketegangan politik sementara itu Tempo.co lebih kritis tidak didasarkan pada penilaian subjektif, melainkan pada indikator *framing* yang diidentifikasi secara sistematis dalam analisis berita. Kehati-hatian Kompas.com tercermin dari dominasi penggunaan sumber resmi pemerintah melalui pernyataan Menteri dan DPR, pendefinisian RUU TNI sebagai bagian dari proses legislasi yang wajar serta rekomendasi solusi yang menekankan

klarifikasi dan sosialisasi kebijakan kepada publik. Kritik terhadap potensi kembalinya dwifungsi militer memang dimuat, namun cenderung diposisikan sebagai kekhawatiran, bukan sebagai inti permasalahan. Sebaliknya, sikap kritis Tempo.co terlihat dari konsistensi penggunaan sumber non-pemerintah seperti akademisi dan kelompok masyarakat sipil, pendefinisian RUU TNI sebagai ancaman terhadap supremasi sipil dan demokrasi, kebijakan yang perlu dicermati secara kritis karena dapat berdampak pada hubungan antara militer dan sipil. Dengan cara ini Tempo.co mengkonstruksi realitas dengan narasi kritis bahwa ini bukan urusan komunikasi pemerintah, melainkan menyangkut kualitas demokrasi. Perbedaan kepemilikan media memengaruhi cara kedua media mendefinisikan masalah, menafsirkan penyebab, membangun penilaian moral, dan menawarkan solusi dalam pemberitaan isu dwifungsi militer pada RUU TNI.

Pola-pola tersebut menunjukkan bahwa perbedaan *framing* kedua media dibangun melalui mekanisme seleksi dan penonjolan informasi yang konsisten, sebagaimana dijelaskan dalam model *framing* Robert N. Entman. Adanya perbedaan cara Kompas.com dan Tempo.co membingkai isu RUU TNI dipengaruhi oleh karakter dan kebijakan dari redaksi masing-masing media *online*.

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini menunjukkan bahwa model *framing* Robert N. Entman masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut, terutama dalam penerapannya pada isu-isu politik yang kompleks seperti pembahasan RUU

TNI. Model yang menitikberatkan pada empat elemen utama *Define Problem, Diagnose Cause, Moral Judgment, dan Treatment Recommendation* dapat dikaji lebih mendalam untuk melihat bagaimana masing-masing elemen tersebut berperan dalam membentuk konstruksi realitas media. Penelitian selanjutnya bisa mengkaji bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi dan berubah seiring waktu dalam siklus pemberitaan isu yang kompleks, seperti isu politik yang sensitif dan kontroversional.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi media, pemerintah, dan masyarakat. Kompas.com dan Tempo.co disarankan untuk terus menjaga kualitas pemberitaan agar tidak hanya informatif tetapi juga membangun pemahaman yang seimbang di masyarakat. Kompas.com disarankan tetap mempertahankan gaya pemberitaan yang netral dan berimbang, sambil memperkaya konteks agar pembaca bisa memahami isi berita secara lebih utuh. Tempo.co juga perlu terus konsisten dengan pendekatan kritisnya, namun tetap menjaga proporsi agar tidak terkesan berat sebelah. Kemudian untuk pemerintah dan DPR perlu lebih terbuka dalam proses pembahasan undang-undang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau citra negatif yang bisa muncul akibat perbedaan cara media membungkai isu. Sementara itu, masyarakat diharapkan meningkatkan literasi media agar mampu menilai pemberitaan secara kritis, memahami keragaman perspektif antar media, serta tidak mudah terpengaruh oleh konstruksi realitas yang dibentuk melalui pemberitaan isu politik dan kebijakan publik.